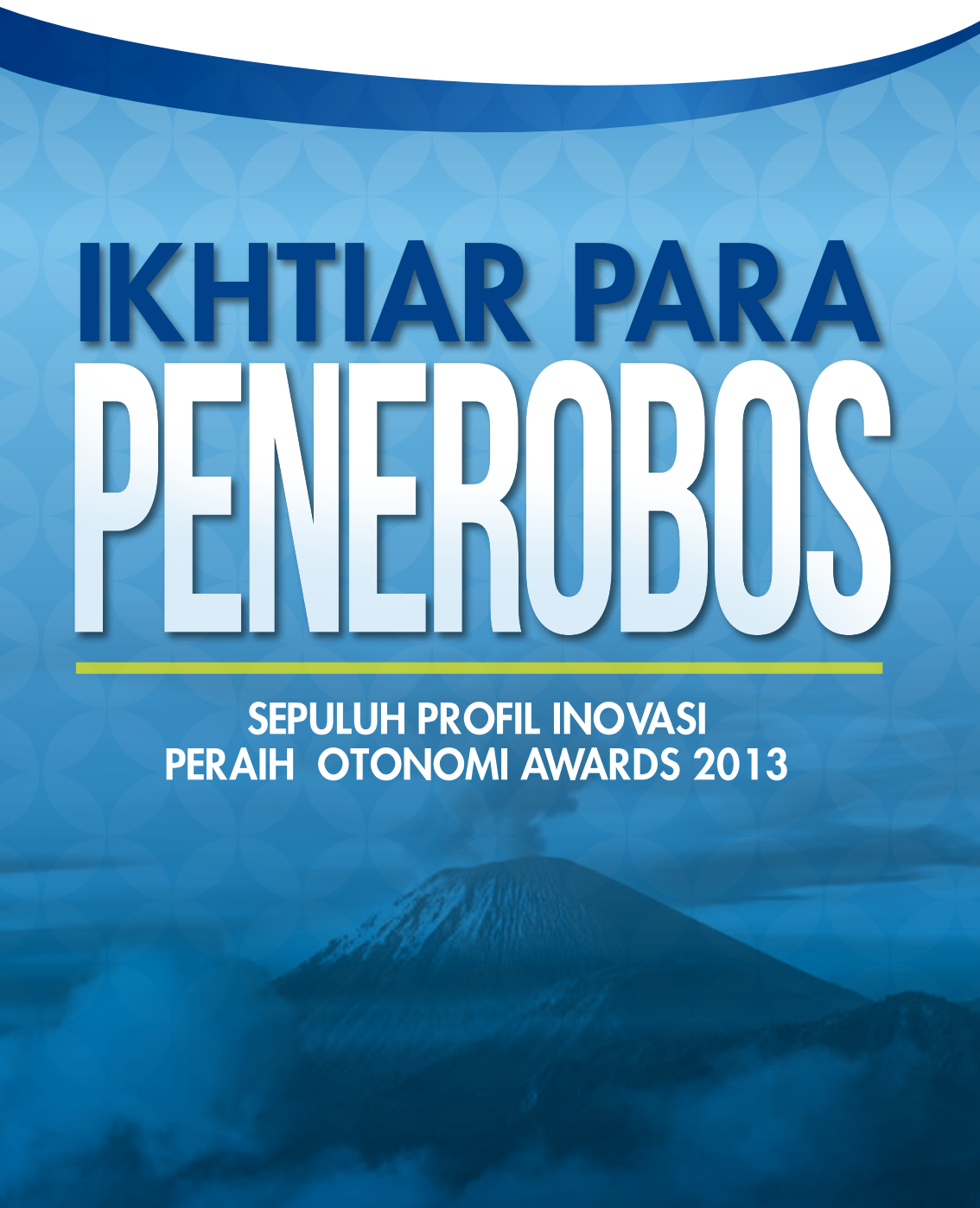


IKHTIAR PARA PENEROBOS

SEPULUH PROFIL INOVASI
PERAIH OTONOMI AWARDS 2013



IKHTIAR PARA PENEROBOS

**SEPULUH PROFIL INOVASI
PERAIH OTONOMI AWARDS 2013**

Oleh :
The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

IKHTIAR PARA PENEROBOS

Sepuluh Profil Inovasi Peraih Otonomi Awards 2013

ISBN :

978-602-71875-2-8

Buku ini disusun berdasarkan riset dari Adi Hisbulwaton, Citra Hennida, Joko Purnomo, Haikal AZ, Hariatni Novitasari, M. Aqib M, Nur Hidayat, Rhido Jusmadi, Rosdiansyah, dan Taufik Akbar.

PENULIS:

Haikal AZ, Hariatni Novitasari, M. Aqib M, Nur Hidayat, & Taufik Akbar

EDITOR:

Nur Hidayat

COVER DESIGN:

Iwanara - akaldesign.net

TATA LETAK:

Alvian K & Iwan

PENERBIT:

The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

ALAMAT:

Graha Pena Lantai 8, Ruang 801, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, 60234,
Telp. 031-8202038

Terbitan Pertama, November 2013 xv+80 halaman; 15 x 22 cm ISBN: Hak Cipta
Dilindungi oleh Undang-undang All rights reserved

KATA PENGANTAR

Sejak 2011, KINERJA - USAID sangat mendukung pelaksanaan *Otonomi Awards* yang dilakukan *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi*, JPIP. Sebagai lembaga yang dilahirkan untuk menjaga dan mendorong implementasi otonomi daerah secara baik, JPIP berkepentingan untuk menciptakan proses rekonstruksi desentralisasi dan otonomi daerah secara obyektif. Salah satu cara terbaik adalah dengan membuka ruang diskursus yang memadai dan menginformasikan secara luas sejumlah praktik baik (*best practices*) otonomi daerah.

KINERJA sangat mengapresiasi berbagai upaya JPIP sebagai organisasi nirlaba yang bersifat independen untuk secara konsisten memantau pelaksanaan otonomi daerah. Hingga saat ini, JPIP telah berhasil menjalankan aktivitas monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan *Otonomi Awards* yang meliputi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tahun 2013 menjadi tahun ke-13 penganugerahan *Otonomi Awards* oleh JPIP.

Untuk memberikan dampak kompetitif, JPIP mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala pada setiap pelaksanaan *Otonomi Awards*. Penilaian ini didasarkan kepada tiga parameter utama, yaitu perkembangan ekonomi, pelayanan publik dan kinerja politik lokal. Juga, parameter khusus sanitasi dan lingkungan hidup.

Untuk mereka yang belum begitu mengenal KINERJA, maka perkenankanlah saya memberikan deskripsi singkat terkait KINERJA. KINERJA adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Program KINERJA dilaksanakan di lima provinsi di Indonesia: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Papua. Program KINERJA-USAID difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tiga sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan iklim usaha.

Salah satu pendekatan utama yang digunakan KINERJA adalah mendorong adanya replikasi praktik-praktik baik. Karena pendekatan ini sangatlah sejalan dengan JPIP, KINERJA mendukung pelaksanaan

Otonomi Awards di Jawa Timur dan juga dua provinsi wilayah program KINERJA lainnya, yaitu: Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan semoga dapat menjadi wadah pembelajaran dan tukar-pikiran bersama terkait praktik-praktik baik dan inovatif yang telah dilakukan berbagai pemerintah daerah di Jawa Timur yang telah meraih penghargaan *Otonomi Awards 2013*.

Selamat dan sukses selalu untuk JPIP! Terima kasih.

Elke Rapp

Chief of Party KINERJA - USAID

	Kata Pengantar <i>Chief of Party KINERJA - USAID</i>	iii
	Daftar isi	v
EKONOMI	Kabupaten Banyuwangi Champion untuk Special Category Pertumbuhan Ekonomi	2
	Kabupaten Sampang Champion untuk Special Category Pemerataan Ekonomi	10
	Kota Malang Champion untuk Grand Category Pengembangan Ekonomi	18
PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Jombang Champion untuk Special Category Pelayanan Pendidikan	26
	Kabupaten Malang Champion untuk Grand Category Pelayanan Publik	34
	Kabupaten Sidoarjo Champion untuk Special Category Pelayanan Administrasi	42
POLITIK LOKAL	Kabupaten Banyuwangi Champion untuk Grand Category Kinerja Politik Lokal	50
	Kota Surabaya Champion untuk Special Category Akuntabilitas Publik	58
KATEGORI KHUSUS	Kabupaten Pacitan Champion untuk Kategori Khusus Sanitasi	66
	Kabupaten Lamongan Champion untuk Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup	74



KABUPATEN BANYUWANGI

Champion untuk Special Category
Pertumbuhan Ekonomi





KABUPATEN BANYUWANGI

Champion untuk Special Category Pertumbuhan Ekonomi

Gerakkan Perekonomian dengan Ekowisata

KETIKA dilantik menjadi Bupati Banyuwangi, 21 Oktober 2010, Abdullah Azwar Anas dihadapkan pada beberapa persoalan serius. Salah satunya, angka kemiskinan yang tinggi. Kala itu, angkanya mencapai 20,48 persen. Problem serius lainnya adalah konektivitas daerah yang dikelilingi oleh gunung dan hutan (taman nasional) ini.

Untuk mencapai daerah berlabel “*Sunrise of Java*” ini, dibutuhkan waktu sekitar tujuh sampai delapan jam perjalanan darat dari Surabaya. “Kalau tidak ada urusan, orang malas pergi ke Banyuwangi. Bisa mabuk di jalan,” ujar Azwar Anas.



- Kawasan Pantai dan Pulau Merah merupakan salah satu kawasan ekowisata andalan Kabupaten Banyuwangi.

Tapi, siapa sangka di balik sulitnya kondisi geografis itu, Banyuwangi memiliki potensi wisata yang luar biasa besar. Salah satu andalannya adalah Segitiga Berlian (*The Triangle Diamond*), yaitu Kawah Ijen, Pantai Sukamade dan Pantai Plengkung (*G-Land*).

Berbekal potensi ini, Anas bertekad untuk mengembangkan industri pariwisata berbasis alam dan budaya atau lebih dikenal dengan ekowisata (*ecotourism*). Dengan ekowisata, laju pembangunan tetap sinergis dengan upaya menjaga kelestarian alam. Ide pengembangan *ecotourism* muncul pada awal 2011, setelah dilakukan studi banding ke beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand.

Dibandingkan dua negara itu, pengembangan *ecotourism* di Indonesia terbilang lambat. Pasalnya, industri pariwisata kita selama ini masih berkiblat ke Bali. “Dengan mengandalkan Bali, Indonesia hanya mampu mendatangkan 8 juta wisatawan setiap tahun. Sedangkan Malaysia mampu mendatangkan 24 juta orang per tahun,” tandas Anas.

Melihat tantangan sekaligus potensi itu, serangkaian langkah cepat dan strategis pun dilakukan. *Pertama*, meningkatkan konektivitas daerah dengan mengoperasikan Bandar Udara Blimbingsari di Kecamatan Rogojampi.

Pembangunan bandara ini telah dimulai sejak 2003. Dua bupati



- Parade Gandrung Sewu yang melibatkan 1.000 orang penari gandrung merupakan salah satu rangkaian kegiatan Banyuwangi Festival 2012.

sebelum Anas juga telah berusaha memulai komersialisasi bandara tersebut. Tapi, keberuntungan belum berpihak kepada keduanya. Bupati sebelum Anas, Ratna Ani Lestari, hanya berhasil mengoperasikan pesawat latih siswa *Bali International Flying Academy* (BIFA).

Meyakinkan maskapai penerbangan untuk membuka rute ke Banyuwangi, memang bukan perkara mudah. Tapi, berbekal jaringan yang dimiliki selama menjadi anggota DPR RI, Anas berhasil menggaet Sky Aviation menjadi maskapai pertama yang melayani penerbangan komersial Surabaya-Banyuwangi pada akhir Desember 2010. Meski Sky Aviation kemudian angkat kaki, langkah maskapai itu justru disusul oleh Merpati Airlines (Agustus 2011) dan Wings Air (September 2012).

Upaya strategis kedua yang ditempuh daerah ini adalah mengumpulkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari unsur pengusaha, perbankan, PT Perhutani dan pengelola taman nasional. Mereka diajak berkumpul untuk menyatukan pandangan tentang *ecotourism* yang sedang gencar dikembangkan.

Langkah itu diambil untuk mengatasi buruknya infrastruktur jalan dan akses masuk ke kawasan wisata andalan di Banyuwangi. Selama ini, pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi kebijakan karena terbentur kewenangan di lokasi wisata yang terletak di kawasan taman

nasional atau cagar alam. Untuk mengatasi kendala tersebut, dibuatlah nota kesepahaman (MoU) antara pemkab dengan PT Perhutani dan pengelola taman nasional. “Dengan MoU itu, kewenangan yang dulu tidak tertembus, kini bisa kita tembus,” tegas pria berkacamata ini.

Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Sebelum 2010, rata-rata jalan baru yang dibangun di kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Timur ini hanya sepanjang 90 kilometer. Pada 2012, panjang jalan tersebut meningkat menjadi 250 kilometer dan bertambah menjadi 300 kilometer pada 2013. Akses jalan yang dibangun termasuk jalan masuk ke lokasi-lokasi wisata, seperti Taman Nasional Baluran.

Keempat, penerbitan Perda No. 13/2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dengan perda ini, industri wisata yang ingin dikembangkan memiliki arahan yang jelas. Jajaran birokrasi pemkab juga lebih mudah memahami *benchmark* pembangunan ekowisata yang hendak dikembangkan.

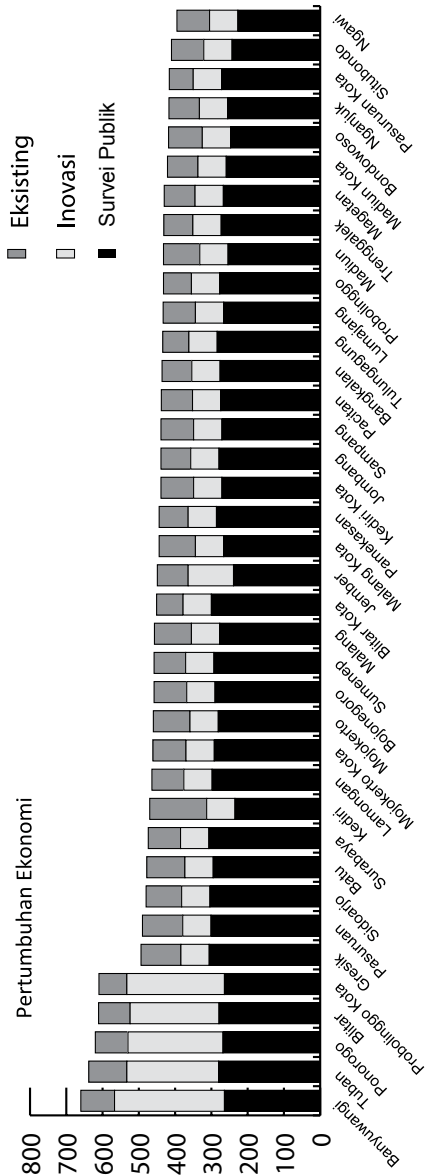
Selain mengandalkan keindahan alam, pengembangan *ecotourism* juga didukung promosi budaya asli Banyuwangi. Caranya dengan menggelar Banyuwangi Festival (B-Fest) yang dikemas dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi (Harjaba) ke-241. Festival ini digelar pertama kali pada 2012 dan dilanjutkan pada 2013.

Selain memberikan kesan positif terhadap citra daerah, rangkaian festival tersebut juga ditargetkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Yang pasti, pendapatan masyarakat pun bertambah seiring banyaknya wisatawan yang bertandang.

Di sisi lain, perbaikan infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang telah dilakukan juga menarik minat beberapa investor untuk melirik kabupaten ini sebagai tujuan investasi. Kini, pemkab sedang mempersiapkan kawasan industri seluas 2,000 hektare di Kecamatan Wongsorejo. Pelabuhan Tanjung Wangi yang berada di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia III pun berbenah untuk menyongsong kedatangan para investor.

Kini, citra kabupaten yang dulu identik dengan santet ini pun telah berubah jauh. Kawasan wisatanya semakin jadi primadona. Angka kemiskinan pun diklaim berhasil dipangkas secara dratis. Dan, laju pertumbuhan ekonominya pun cukup fantastis, dari 6,22 persen pada 2010 menjadi 7,27 persen pada 2012. Selain itu, angka kemiskinan juga diklaim telah turun tinggal 10.48 persen pada 2012.

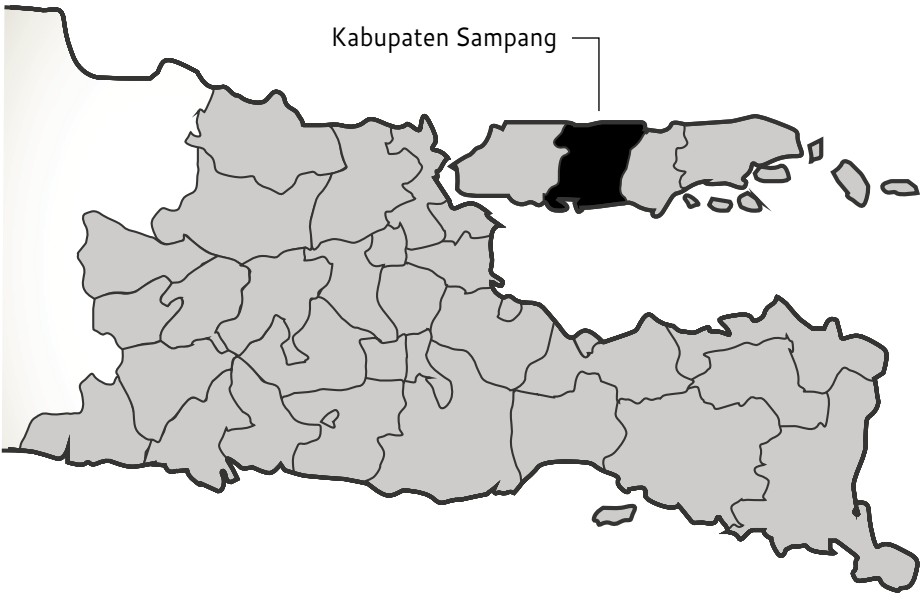
Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





KABUPATEN SAMPANG

Champion untuk Special Category
Pemerataan Ekonomi



KABUPATEN SAMPANG

Champion untuk Special Category Pemerataan Ekonomi

Permudah Akses Modal dengan Garansi Personal

BERPREDIKAT sebagai daerah termiskin tidak membuat Pemerintah Kabupaten Sampang patah arang. Di tengah berbagai keterbatasan, daerah ini terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya. Upaya pemkab dalam meretas problem akses permodalan masyarakat lapisan bawah, menjadi bukti kesungguhannya.

Kemudahan akses modal antara lain diberikan kepada pelaku usaha yang baru lulus dari perguruan tinggi (*fresh graduated*) dan masih merintis usahanya. Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM), program perkuatan kredit dana bergulir dikemas menjadi stimulan berwirausaha bagi masyarakat. Beragam rintisan usaha baru pun muncul bersamaan dengan dijalankannya program yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten ini.

Salah satu terobosan daerah ini adalah memodifikasi persyaratan kredit bagi usaha mikro. Semula, kredit yang disalurkan tanpa agunan justru memicu persepsi keliru di masyarakat. Dana yang seharusnya bisa digulirkan kepada pelaku usaha lain, malah dianggap hibah yang tidak perlu

dikembalikan. Akibatnya, dana itu pun macet di tengah jalan.

Kondisi tersebut memicu ide untuk menjadikan garansi personal sebagai semacam agunan. Dengan begitu, pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan untuk mengakses bantuan permodalan meski belum memiliki badan hukum dan kelengkapan administratif lainnya. “Garansi personal bisa didapatkan dari pegawai negeri sipil atau kepala desa setempat,” ujar Hernandi, Koordinator TKB Kabupaten Sampang.

Untuk memastikan validitas pemohon kredit, Pemkab melakukan restrukturisasi tim survei dengan melibatkan bagian perekonomian, dinas perindustrian perdagangan dan pertambangan, unsur perbankan (Bank Jatim dan BPR Bakti Artha Sejahtera), dan bidang-bidang di lingkup Dinkop UKM. Tujuannya, agar hasil survei lebih objektif dan akuntabel. Standar operasional prosedur penyaluran kredit pun dibuat lebih sederhana dan mudah diakses UMKM.

Guna menjembatani UMKM dengan Dinkop UKM, Pemkab menempatkan tenaga konsultan bisnis (TKB) di setiap kecamatan. Tugas TKB antara lain mendampingi proses penyusunan proposal kredit sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perbankan. Juga memberikan konsultasi terkait aspek produksi, manajemen, pemasaran, dan permodalan.

Sekilas, program ini tidak jauh beda dengan upaya yang dilakukan daerah lain. Namun, penelusuran tim JPIP menemukan fakta bahwa Pemkab Sampang telah berhasil mengolah potensi kaum muda untuk menjadi ujung tombak program dengan menjadikan mereka sebagai TKB.

Cikal bakal keberadaan TKB berawal dari program *Business Development Service* (BDS) pada 2001. Setelah berjalan lima tahun (2006), BDS mengembangkan *pilot project* yang pada gilirannya berkembang menjadi TKB di enam titik (kecamatan).

Pada 2009, Pemkab memperluas cakupan program sekaligus merekrut tenaga *fresh graduated* untuk menjadi TKB. Tak muluk, kompetensi dasar yang disyaratkan bagi personel TKB adalah lulusan (minimal) diploma tiga (D-3), memiliki keterampilan dasar sebagai konsultan, serta memiliki kemauan kuat dalam melakukan pendampingan. Personel TKB terpilih kemudian mengikuti *upgrading* untuk pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan.

Setiap TKB ditugaskan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan pada satu wilayah kecamatan. Untuk memaksimalkan fungsi dan perannya, setiap TKB diwajibkan mendampingi sedikitnya 10 UMKM. Di kabupaten ini, rata-rata terdapat 20 UMKM dan wira usaha baru (WUB) di



- Para pedagang sayur keliling merupakan salah satu penerima manfaat program kredit modal tanpa garansi personal di Kabupaten Sampang

setiap kecamatan. “Khusus untuk WUB, syarat pengajuan kredit bisa dilakukan dengan menjaminkan ijazah,” imbuh Hernandi.

Kendati telah melewati tahap *upgrading*, personel TKB tetap harus beradaptasi dengan beragam tantangan di lapangan. “Anggapan keliru yang menyamakan dana bergulir dengan hibah, masih cukup melekat di benak masyarakat,” ungkap Kepala Dinkop UKM Sampang Saryono.

Berkat keuletan dan ketekunan personel TKB, persepsi keliru itu perlahan mulai diluruskan. Pendampingan yang dilakukan oleh TKB secara berkala terbukti efektif dalam membentuk kemandirian dan membangun kesadaran pelaku UMKM.

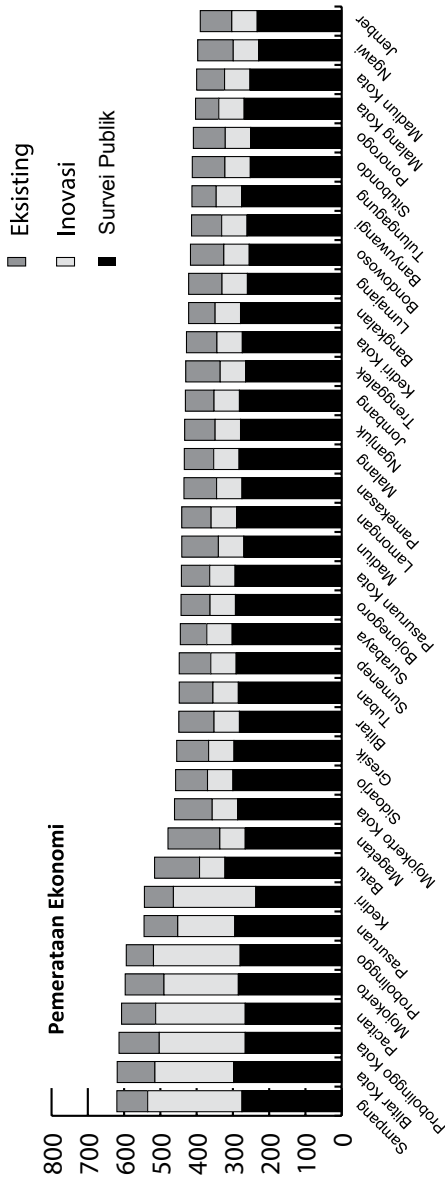
Hasilnya, antara lain, dapat dilihat dari statistik jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas akses permodalan pada 2011-2012. Meski jumlahnya menurun dari 186 menjadi 151 UMKM, dana yang tersalurkan

justru meningkat dari Rp 2,7 miliar (2011) menjadi Rp 3,067 miliar (2012). “Persentase tunggakan juga turun dari 1,7% menjadi 1,1%,” ujar Saryono.

Saryono mengakui, capaian tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran kunci TKB. Pasalnya, bagi kalangan TKB, upaya pendampingan UMKM tidak dianggap sekedar pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktanya, insentif yang diterima TKB dan tugas pendampingan yang dibebankan kepada mereka belumlah seimbang. “Tak jarang, TKB harus menghadapi medan yang tak bersahabat dalam tugas pendampingan,” ungkap TKB Kecamatan Sreseh Rahmat Hidayat.

Rahmat menambahkan, bagi TKB, semua pahit-getir dalam aktivitas pendampingan terbayar bukan oleh besaran honor, tapi kepuasan batin tatkala UMKM atau warga dampingan mereka berhasil memajukan usahanya. “Kami yakin, tugas kami bertujuan memudahkan urusan dan usaha banyak orang. Karena itu, kami juga yakin, suatu saat nanti kemudahan akan datang pada kami ataupun anak-cucu kami,” imbuh Rahmat.

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur

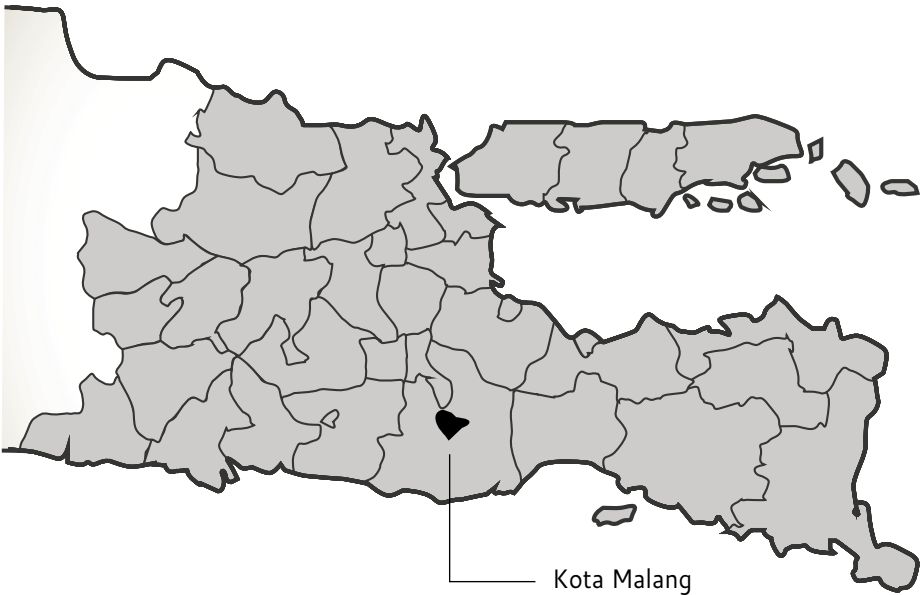




KOTA MALANG

Champion untuk Grand Category
Pengembangan Ekonomi

Champion untuk Special Category
Pemberdayaan Ekonomi Lokal



KOTA MALANG

- Champion untuk Grand Category Pengembangan Ekonomi
- Champion untuk Special Category Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Ketika Sampah Menjadi Rupiah

SAMPAH merupakan problem yang dihadapi semua daerah. Di wilayah perkotaan, persoalan tersebut semakin terasa karena padatnya penduduk dan tingginya volume sampah. Hal tersebut juga dirasakan kota yang terdiri dari 57 kelurahan ini.

Berangkat dari keinginan kuat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bebas dari sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang merintis pengembangan bank sampah sejak pertengahan 2011. Pelopornya adalah para kader lingkungan yang dipimpin oleh Rahmat Hidayat.

Bank Sampah Malang (BSM) sebenarnya bukan yang pertama di Indonesia. Lembaga serupa telah ada di beberapa daerah lain, ketika Kota Pendidikan ini bertekad mendirikan BSM. Tapi, keseriusan para pengurusnya telah mengubah program ini menjadi sebuah gerakan masyarakat, bukan sekadar program Pemkot Malang.

Hingga November 2013, BSM yang berkantor pusat di Jalan S Supriyadi

No. 38 Malang ini telah memiliki 303 unit BSM Masyarakat dan 174 unit BSM Sekolah. Juga 24 BSM instansi, 14 unit lapak pengepul dan 542 anggota perorangan.

Dari jumlah itu, sekitar 90 persen BSM Masyarakat yang dinilai aktif. Sedangkan untuk BSM Sekolah, jumlah unit yang dinilai aktif lebih kecil lagi (sekitar 60 persen). “Tapi, total nasabah kami telah mencapai lebih dari 22 ribu orang,” tutur Rahmat yang kini menjabat Direktur BSM.

Dari sisi volume, BSM awalnya hanya mampu mengolah dua ton sampah per hari. Saat ini, kemampuan tersebut telah meningkat menjadi tiga ton per hari. Omzetnya pun tidak bisa dibilang kecil, berkisar antara Rp 4-5 juta per hari atau sekitar Rp 150 juta per bulan. “Keuntungan bruto yang diperoleh BSM sekitar 30-35 juta per bulan,” imbuhnya.

Nilai omzet tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan kondisi setahun lalu. Pada awal November 2012, Kepala DKP Kota Malang Wasto sempat menyatakan bahwa nilai transaksi BSM baru mencapai dua juta rupiah per hari.

Keberhasilan Rahmat mengembangkan BSM memang tidak bisa dilepaskan dari peran DKP yang dipimpin oleh Wasto. Juga, dukungan penuh dari tim penggerak PKK pada saat kepemimpinan Peni Suparto. “Pak Wasto *all out* membantu BSM. Baik dari aspek pemikiran, pendanaan, maupun pengawasan dan pembinaan,” aku Rahmat.

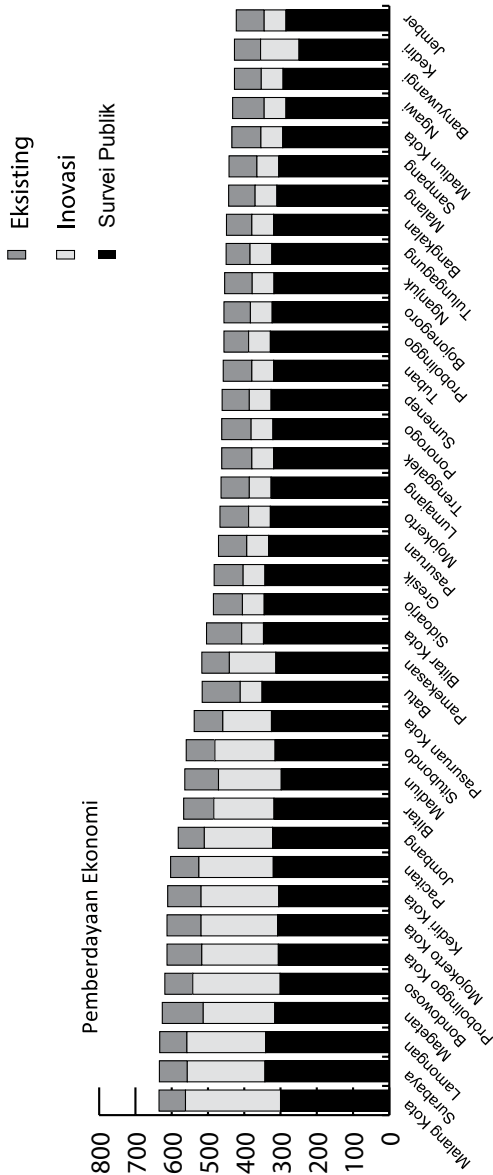
Jika dibandingkan dengan total volume sampah Kota Malang yang berkisar antara 400-600 ton per hari, jumlah sampah yang berhasil diolah oleh BSM tentu belum seberapa. Namun, dari sisi partisipasi masyarakat, kota ini relatif telah berhasil menjadikan bank sampah sebagai sebuah gerakan yang bersifat massif.

Boleh dikata, kehadiran BSM selama dua tahun terakhir telah mengubah paradigma masyarakat yang semula menganggap sampah sebagai musuh. Kini, masyarakat kota ini semakin akrab dan bersahabat dengan sampah.

Dengan moto “*Pinjam Uang Nyicil Sampah, Beli Sembako Bayar Sampah*”, kehadiran BSM bukan lagi sekadar gerakan yang bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lebih dari itu, ia telah berhasil menjadi sebuah gerakan ekonomi yang berorientasi lingkungan.

Dengan minimal tiga orang pengurus pada tiap unit BSM Masyarakat, sedikitnya 909 orang telah mendapatkan *income* tambahan dari gerakan ini. Jumlah itu belum termasuk 22 ribu orang anggota BSM yangmendapatkan

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





nilai tambah dari setiap sampah yang mereka setor.

Sebagaimana layaknya bank, BSM juga memiliki beberapa jenis tabungan. Saat ini, BSM telah memiliki enam produk yang memiliki keunggulan berbeda. Yaitu, Tabungan Regular (bisa diambil sewaktu-waktu), Tabungan Lebaran (diambil jelang Idul Fitri), Tabungan Sekolah (diambil jelang tahun ajaran baru), dan Tabungan Sembako (ditukar dengan sembako).

Juga, Tabungan Lingkungan (ditukar dengan sarana lingkungan seperti komposter, tanaman, tempat sampah atau gerobak sampah) dan Tabungan Sosial (nilai tabungan disalurkan kepada panti asuhan, pondok pesantren atau lembaga sosial lain sesuai permintaan nasabah). Dua produk terakhir ini ditujukan untuk merangkul kalangan ekonomi kelas menengah agar mau menjadi nasabah BSM.

Sejak 2012, masyarakat Kota Malang juga dapat membayar tagihan listrik dengan menyeter sampah. Pasalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menyediakan fasilitas *Payment Point Online Bank* alias PPOB "Bayar Listrik dengan Sampah" di beberapa BSM. "Ada tujuh unit BSM yang telah melayani pembayaran listrik dengan sampah," pungkas Rahmat.



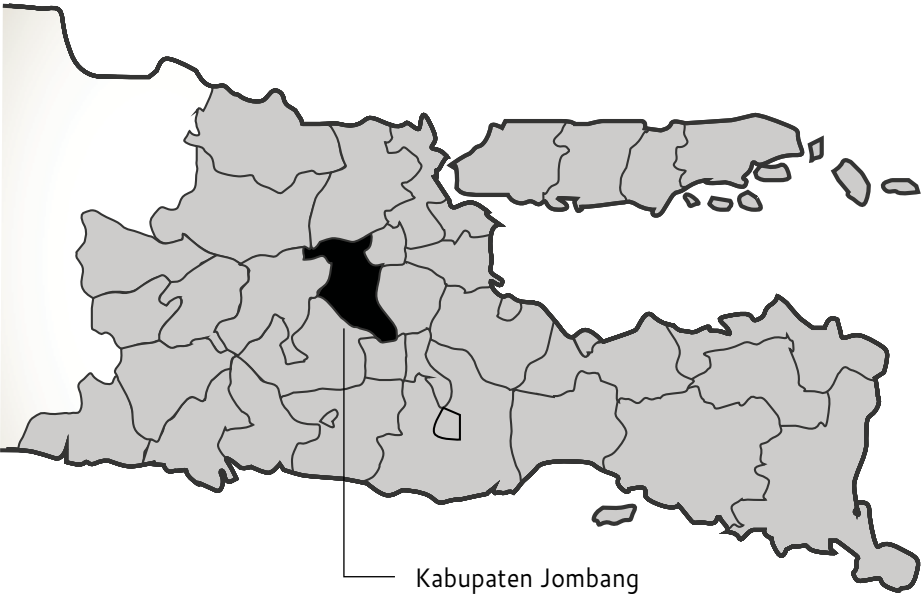
- Warga di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Suku, Malang sedang menjual sampah plastik dari rumah mereka ke BSM.

Wali kota Malang Muhammad Anton menyampaikan bahwa program pengembangan ekonomi di Kota Malang, yang saat ini hanya berpusat di sisi barat, kedepan akan dikembangkan ke sisi timur Kota Malang, misalnya dengan pembangunan pasar tradisional gadang. Namun khusus untuk program bank sampah akan terus dikembangkan dengan memperkuat peran perempuan melalui tim penggerak PKK yang saat ini dipimpin oleh Dewi Farida Suryani, istri wali kota Malang, ungkap Abah Anton saat ditemui tim peneliti JPIP di balaikota Malang.



KABUPATEN JOMBANG

Champion untuk Special Category
Pelayanan Pendidikan



KABUPATEN JOMBANG

Champion untuk Special Category Pelayanan Pendidikan

Dorong Transparansi Informasi Melalui Radio

DALAM kultur birokrasi, mempertahankan sebuah program hingga dapat bertahan selama satu dekade adalah sebuah capaian yang patut diapresiasi. Itulah salah satu pertimbangan *The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi* (JPIP) menganugerahkan trofi Otonomi Awards 2013 kategori pelayanan pendidikan kepada Kabupaten Jombang. Seperti apa terobosan programnya?

Jika anda bepergian ke Kota Santri ini, cobalah menyalakan radio dan berhentilah pada frekuensi 90,2 MHz. Itulah frekuensi Radio Suara Pendidikan FM Jombang. Siaran radio yang awalnya digagas staf dinas pendidikan itu telah dirintis sejak 15 Oktober 2004. Dengan kata lain, Radio SP FM kini telah genap berumur 10 tahun.

“Embrio radio ini sebenarnya berasal dari program Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) yang ditelorkan oleh Depdiknas,” ujar Pri Adi, salah satu pendiri Radio SP FM. “Waktu itu, ada anggaran Rp 25 juta untuk pengembangan radio,” imbuhnya.

Pada 2007, ketika peneliti JPIP mulai merekam inovasi tersebut, studio SP FM adalah sebuah ruangan kecil yang melekat di sisi selatan ruang tata usaha dinas pendidikan. Saat itu, Pri Adi masih berstatus staf di bagian keuangan. Kini, dia telah menduduki posisi kepala bidang ketenagaan. Radio SP FM pun telah memiliki dua unit studio yang cukup luas dan fasilitas yang cukup memadai.

Minimnya anggaran yang dialokasikan dari program Jardiknas, tidak menciutkan nyali tim kecil yang dipimpin Pri Adi. Sebab, dia bersama dua temannya punya cita-cita besar terkait pengelolaan pendidikan di Kabupaten Jombang. “Kami ingin mempercepat informasi dari dinas pendidikan ke sekolah dan menerima pengaduan dari guru, sehingga terwujud pelayanan yang *clean*, bebas suap dan pungli,” tegasnya.

Tapi, cita-cita mulia itu bukan tanpa hambatan. Pada awal beroperasi, resistensi terhadap keberadaan Radio SP FM justru datang dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Pasalnya, tidak jarang informasi dari dinas justru lebih cepat diterima guru dibandingkan staf atau pimpinan UPTD. “Akhirnya, UPTD juga kami haruskan memantau radio agar tidak ketinggalan informasi,” kisahanya.

Sejak awal, keberadaan radio ini memang dimaksudkan untuk memutus mata rantai birokrasi dalam distribusi informasi. “Guru tidak perlu lagi menunggu info dari kepala sekolah atau kepala UPTD. Setiap penyimpangan atau pungutan terhadap pelayanan juga dapat langsung diterima oleh dinas, sehingga penanganannya lebih dini,” tandas peraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang ini.

Perlahan tapi pasti, pengakuan akan manfaat kehadiran radio ini pun mengalir. Berawal dari materi dan program siaran yang didominasi nuansa pengumuman, Radio SP FM kini telah berkembang menjadi media komunikasi dan transparansi informasi pendidikan di daerah.

Beragam program *talk show* juga digelar untuk membahas berbagai persoalan. Mulai dari problem pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga pertanian. “Sejak 2012, setiap Sabtu malam, kami juga mengembangkan *talk show* tentang hukum waris Islam. Antusiasme masyarakat Jombang terhadap program ini cukup tinggi,” ungkap Direktur Program Radio SP FM Indra Setiawan.

Ahmad Jasminto, Kepala SMK Khoiriyah Hasyim Seblak, Jombang, juga mengapresiasi kehadiran Radio SP FM. Menurut dia, semua informasi pendidikan menjadi lebih mudah diakses dengan hadirnya radio tersebut.



- Radio Suara Pendidikan Kabupaten Jombang ini telah berhasil memutus mata rantai birokrasi dalam distribusi informasi.

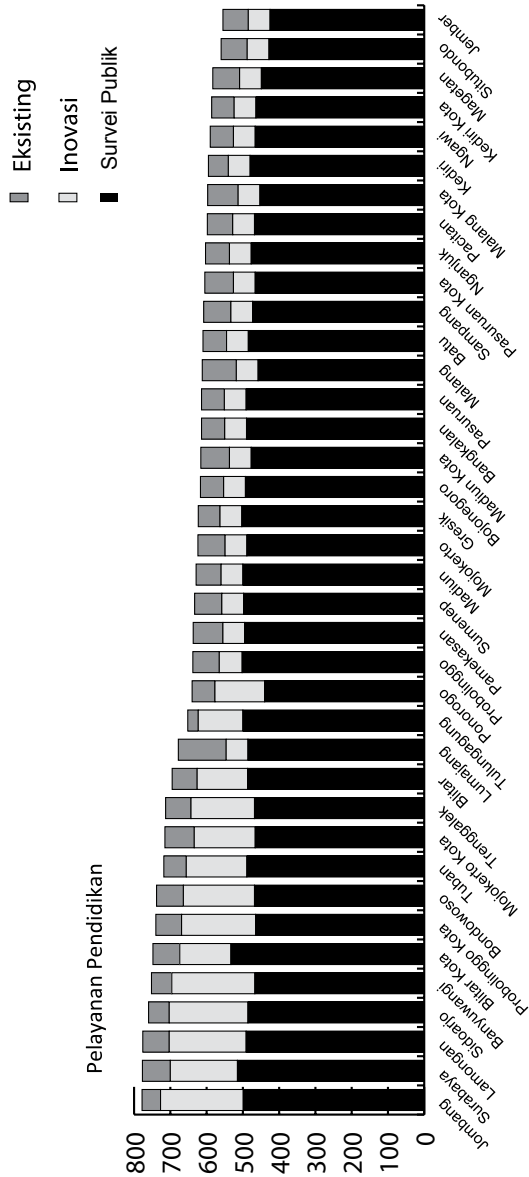
Apalagi setelah semua dokumen dinas pendidikan diunggah secara rutin di www.suarapendidikan.com. “Informasi bisa didapatkan oleh guru dan sekolah secara cepat dan akurat,” tuturnya

Setelah berjalan lebih dari lima tahun, kerja keras Pri Adi dan tim radio akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya payung hukum berbentuk peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup). Pada 23 Juli 2010, Bupati Suyanto menerbitkan Perda No. 6/2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang. Setahun kemudian, tepatnya pada 21 September 2011, perda tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam perbup yang mengatur tugas pokok dan fungsi dewan pengawas dan dewan direksi radio.

Dari sisi anggaran, dukungan yang diberikan dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga terus meningkat. Pada 2009, alokasi APBD untuk operasional Radio SP FM sebesar Rp 90 juta. Jumlah itu meningkat drastis menjadi Rp 280 juta per tahun selama 2011-2014. Alokasi itu tidak termasuk anggaran untuk pembangunan dua studio senilai hampir Rp 100 juta pada tahun 2007-2008.

Selain mendorong transparansi melalui udara, dinas pendidikan juga

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur



berusaha meningkatkan transparansi kebijakan di darat. Salah satunya adalah upaya menghapus pungutan (liar) atas pelayanan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan sektor pendidikan.

Hal itu diwujudkan dengan menyiapkan beberapa loket pelayanan yang mencantumkan dengan jelas prosedur pelayanan di dinas pendidikan. Di bagian depan, terdapat lima loket pelayanan yang diperuntukkan bagi pelayanan umum. Sedangkan empat loket yang berlokasi di bagian dalam kompleks kantor dinas pendidikan diperuntukkan untuk pelayanan kepegawaian.

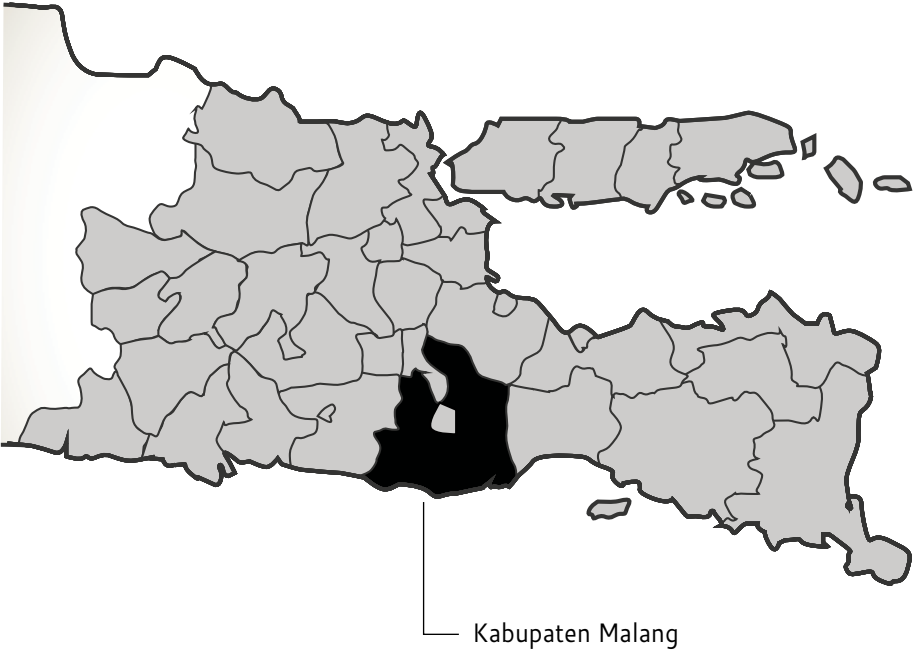
Deretan loket itu disiapkan sesuai dengan fungsi masing-masing. Mulai dari pelayanan legalisasi ijazah, pelayanan persuratan, hingga pengajuan kredit bagi guru. Untuk pelayanan kepegawaian, loket disiapkan mulai dari penilaian angka kredit guru/pengawas, pengaduan pelayanan dinas pendidikan, pengurusan kenaikan pangkat, hingga izin perceraian pegawai negeri sipil. Di semua loket itu, sebuah tulisan berwarna merah terbaca jelas: Gratis, Tanpa Suap dan Pungli.



KABUPATEN MALANG

Champion untuk Grand Category
Pelayanan Publik

Champion untuk Special Category
Pelayanan Kesehatan



KABUPATEN MALANG

- Champion untuk Grand Category Pelayanan Publik
- Champion untuk Special Category Pelayanan Kesehatan

Sutera Emas dari Kepanjen

SUTERA Emas bukan sebutan bagi jenis kain, tapi akronim dari Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat. Sebuah sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit yang berpotensi wabah dan mengancam kematian ibu dan anak. Embrio program ini berasal dari aktivitas pemantauan penyakit yang dilakukan oleh Hadi Puspita dan tim surveilans Puskesmas Kepanjen.

Sejak 2004 penerima anugerah Dokter Teladan Nasional 2006 itu menggabungkan sensus harian penyakit dengan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuannya, membangun sistem kewaspadaan dini, menurunkan angka kematian ibu dan anak, mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan, serta mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) penyakit.

Yang tidak kalah penting, petugas *data entry* merasa bahwa tugas mereka benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif birokrasi kesehatan. Peran kunci Hadi Puspita sebagai inisiator diakui oleh Bupati Malang Rendra Kresna. "Saya mendengar terobosan Sutera Emas ini sejak menjabat wakil bupati. Lalu, saya mencoba memberikan dukungan dari aspek kebijakan," ujarnya.

Dalam catatan JPIP, cerita tentang inovasi ini terekam sejak 2007.

Hanya, hingga tahun lalu terobosan kebijakan tersebut belum bisa masuk ke peringkat atas dalam penilaian JPIP. Pasalnya, gabungan nilai inovasi dengan dua komponen penilaian lainnya (survei publik dan *data existing* kesehatan), belum memungkinkan kabupaten terluas kedua di Jatim ini masuk nominasi peraih kategori pelayanan kesehatan.

Tahun lalu posisi lima besar kategori pelayanan kesehatan ditempati Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Malang. Kabupaten Pamekasan berhasil memboyong piala dengan inovasi dokter turun ke pedesaan (Terkesan) dan optimalisasi peran



- Puskesmas merupakan tonggak keberhasilan program SUTERA EMAS di Kabupaten Malang selain adanya tim surveillance di tingkat masyarakat.

komite kesehatan. Sistem yang dibangun dalam Sutera Emas sebenarnya tidak terlalu rumit.

Biayanya juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Meski demikian, butuh waktu untuk meyakinkan para pengambil kebijakan dan publik bahwa program ini benar-benar bermanfaat. Ini bukan sekadar otak-atik angka statistik.

Cara kerja sistem ini sederhana. Kader kesehatan di tingkat rukun

tetangga (RT) diminta melaporkan setiap penyakit yang diderita warga di wilayahnya. Perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil yang berpotensi risiko tinggi, juga bayi penderita gejala kurang gizi. Setiap ada warga yang sakit, kader diminta melapor kepada bidan desa. Bidan meneruskan laporan tersebut ke server dinas kesehatan melalui layanan pesan singkat (SMS). Isinya, antara lain, data penderita, lokasi kejadian, dan jenis keluhan.

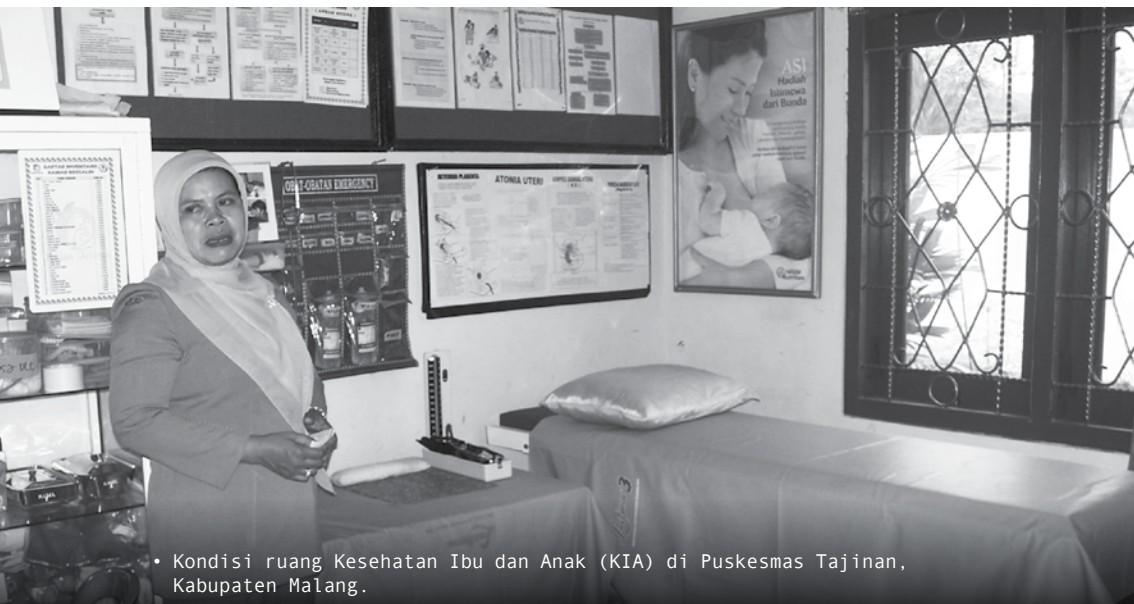
Ketika jumlah laporan telah melampaui batas yang ditentukan, server akan menyalakan alarm pada peta lokasi wilayah yang terkena wabah. Saat diteliti JPIP pada 2007, peta yang dimiliki Puskesmas Kepanjen masih sangat sederhana. Hanya berupa lampu di tiap titik desa pada peta kecamatan.

Lampu inilah yang akan menyala ketika terjadi KLB. Sebutannya pun masih *Community Based Surveillance* (CBS). Nama Sutera Emas baru muncul pada 2009, setelah Hadi berembuk dengan dua temannya, Sri Lesmono Hadi dan Riyanto. "Kami didesak oleh Pak Agus Wahyu Arifin (kepala dinas kesehatan saat itu) untuk memberi nama program sebagai ikon puskesmas," kisah Hadi. Kini peta tersebut sudah dikelola secara terkomputerisasi (*computerized*).

Peta di layar komputer akan menyala pada titik RT yang berpotensi KLB. Pada saat yang sama, notifikasi melalui SMS akan dikirimkan kepada tim reaksi cepat puskesmas dan dinas kesehatan. Dukungan dana dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada 2009 menjadi kunci pengembangan awal Sutera Emas secara terkomputerisasi ini. Namun, kunci utama program ini sebenarnya berada di tangan kader kesehatan tingkat RT.

Pada 2005 CBS diadopsi oleh Departemen Kesehatan RI untuk diimplementasikan di Provinsi Lampung dan Jatim. Tapi, program tersebut tidak berkesinambungan. Ego sektoral antardirektorat di internal kementerian menjadi faktor determinan "kematian" program ini. Pada semester kedua 2009, CBS yang telah bermetamorfosis menjadi Sutera Emas mulai memikat banyak kalangan. Mursyidah, yang saat itu menjabat pelaksana tugas kepala dinas kesehatan, berusaha mempromosikan program ini pada tingkat nasional. "Sempat juga kami tampilkan di Jakarta dalam sebuah pameran terkait *Millenium Development Goals* (MDGs)," ungkapnya.

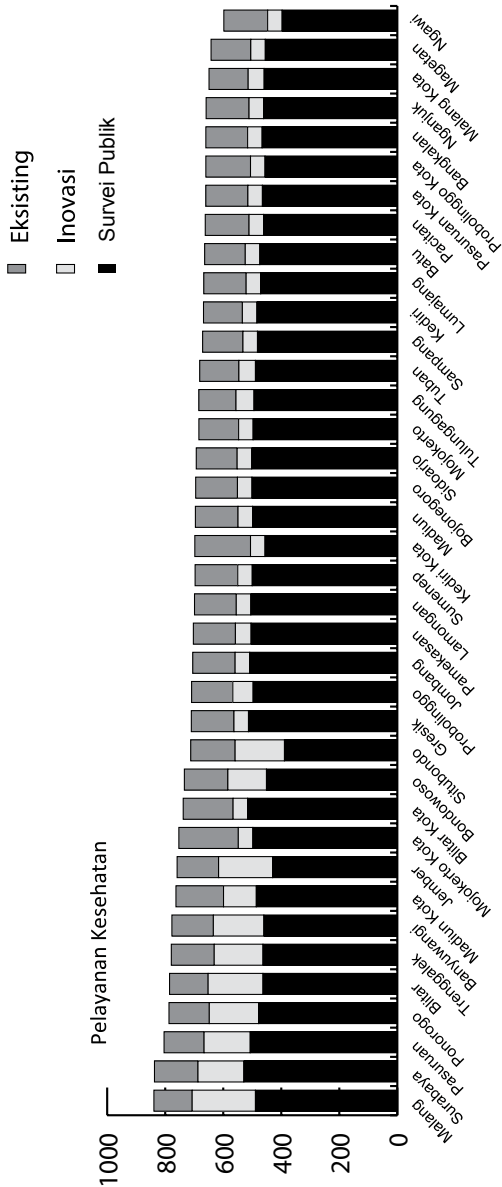
Upaya Mursyidah mempromosikan Sutera Emas tidak sia-sia. Pada 2012 Kabupaten Malang ditunjuk menjadi salah satu pelaksana program *Expanding Maternal and Neonatal Survival* (EMAS) yang disponsori USAID. "Khusus Kabupaten Malang, program EMAS dilaksanakan oleh delapan puskesmas dan sudah terintegrasi dengan Sutera Emas," tuturnya.



- Kondisi ruang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Tajinan, Kabupaten Malang.

Namun, Sutera Emas tetaplah berbeda dengan EMAS. Sebab, Sutera Emas telah mengalami proses yang panjang dan melibatkan beragam suasana batin sekitar 545 kader tingkat RT di Kecamatan Kepanjen. Insentif Rp 12 ribu per bulan yang mereka terima sebenarnya tidak bermakna apa-apa. Tapi, pengalaman batin turut terlibat dalam penyelamatan nyawa seseorang, membuat setiap kader merasa bangga terhadap tugas mereka. Dan, itulah yang membuat mereka bertahan hingga saat ini. Kondisi itu tidak bisa dilepaskan dari lima pilar utama Sutera Emas. Yaitu, *early case finding*, *early case reporting*, *early case handling*, *real time activities*, dan *community empowering*. "Dengan prinsip itu, tidak ada satu pun kader yang *prothol* alias *drop out*," ungkap Hadi Puspita.

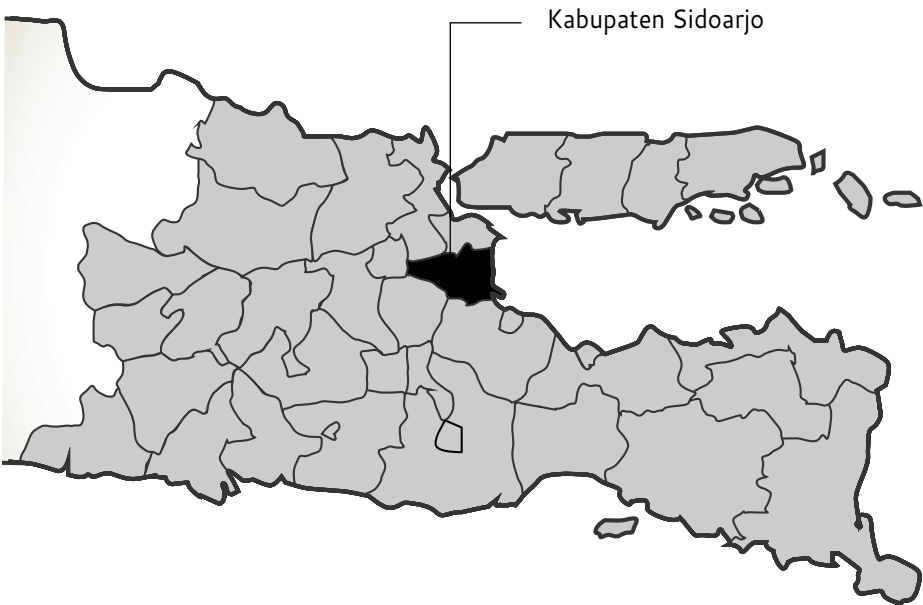
Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





KABUPATEN SIDOARJO

Champion untuk Special Category
Pelayanan Administrasi



KABUPATEN SIDOARJO

Champion untuk Special Category Pelayanan Administrasi

Tawarkan Sistem Paket, Pangkas Proses Perizinan

DALAM konteks desentralisasi, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mengawali penerapan pelayanan perizinan secara terpadu. Pada 2001, daerah ini telah membentuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM). Satuan kerja ini merupakan penyempurnaan unit pelayanan terpadu (UPT) yang telah dirintis sejak 1997.

Mengutip iklan salah satu produk, daerah ini terus berinovasi tiada henti. Pada 2003, DPPM menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Keberanian inilah yang menjadi salah satu pertimbangan JPIP menganugerahkan *Otonomi Award* kategori pelayanan administrasi pada 2005.

Pada 2008, terjadi perubahan nomenklatur DPPM menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Hal itu sebagai implementasi PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sistem manajemen mutu yang diterapkan pun di-*upgrade* menjadi ISO 9001:2008 pada 2010.

Setahun berikutnya, badan yang berkantor di Jalan Pahlawan Sidoarjo



- Suasana ruang pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Sejak 2012, BPPT telah memberikan pelayanan perizinan parallel.

kali ini merintis inovasi pelayanan perizinan satu paket. Program ini diluncurkan pada akhir 2011 dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) No 39/2011 tentang Penerbitan Perizinan Satu Paket. Dalam tataran implementasi, peraturan ini baru efektif berlaku pada Januari 2012.

Inovasi yang berasal dari inisiatif staf BPPT ini dikenalkan kepada publik dalam Pameran Pelayanan Publik di Madiun. Program ini merupakan upaya BPPT untuk menggabungkan prosedur dan tahapan pengurusan beberapa izin menjadi satu proses terpadu, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat.

Ada dua jenis paket perizinan yang ditawarkan. Paket I terdiri dari enam jenis perizinan dan Paket II terdiri dari tiga jenis perizinan. Dalam proses pengurusan secara reguler (satu persatu), keenam izin dalam Paket I baru akan selesai dalam 24 hari kerja setelah semua syarat dinyatakan lengkap. Sedangkan tiga jenis izin dalam Paket II baru bisa selesai dalam 21 hari kerja.

Dengan adanya sistem paket, waktu yang dibutuhkan dapat dipangkas menjadi 14 hari kerja (Paket I) dan 10 hari kerja (Paket II). Program ini dianggap menguntungkan masyarakat yang ingin membuka usaha baru seperti retail dan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM).

Waktu pelayanan dapat dipangkas karena pemohon izin tidak perlu menyerahkan dokumen persyaratan satu per satu dari awal. Sebab, beberapa izin yang digabung sebenarnya mensyaratkan dokumen yang sama. Sehingga, pemohon cukup sekali kirim berkas untuk memenuhi persyaratan beberapa jenis izin.

Terobosan ini mendapatkan dukungan dari Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, “Saya mendukung sekali inovasi yang muncul dari bawah (BPPT, *red*). Apalagi kalau hal itu bisa mempercepat pelayanan. Bagi kita, semakin cepat, semakin bagus,” ungkap Saiful.

Meski mendapatkan dukungan dari bupati, proses penggabungan izin dalam satu paket ini tidak lahir secara serta merta. Ada beberapa tahapan yang dilalui. Pertama, dilakukan analisis terhadap 37 jenis perizinan yang ada di Sidoarjo. Berikutnya, diperoleh kesepakatan tentang perizinan mana saja yang dapat digabung. “Butuh waktu dua bulan untuk melahirkan program perizinan satu paket ini,” ungkap Sekretaris BPPT Reddy Kusuma.

Manfaat dan kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya sistem paket ini diakui oleh Masbukin, staf divisi legal sebuah perusahaan retail. Dalam dua tahun terakhir, dia mengakui telah mengurus 40 izin baru di Sidoarjo dengan sistem paket.

Pria yang bertanggung jawab terhadap pengurusan izin di wilayah Jawa Timur ini mengakui pelayanan BPPT Sidoarjo paling bagus dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Karena itu, dia berharap model yang diterapkan Sidoarjo dapat ditiru oleh daerah lain. “Waktunya lebih cepat, surveinya juga



- Dengan perizinan paralel, lama pengurusan perizinan bisa dipangkas.

cukup sekali,” ungkapnya.

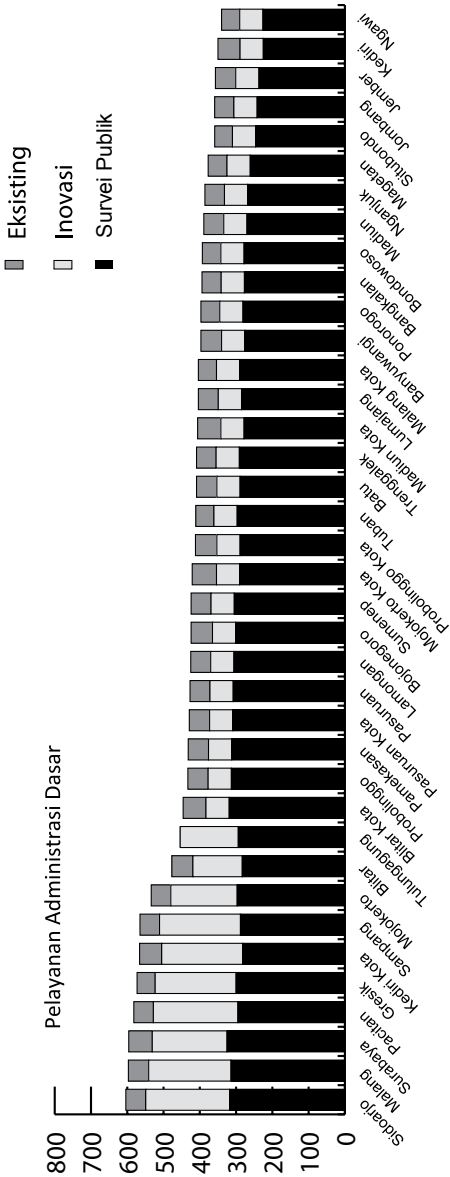
Selain memangkas waktu perizinan, BPPT juga memberikan kemudahan dengan proses pengajuan izin secara daring (*online*). Melalui situs BPPT, masyarakat bisa mengunggah *soft copy* dokumen yang dipersyaratkan dan baru menyerahkan dokumen asli saat verifikasi atau survei. Selain itu, pemohon juga dapat melacak status izin yang telah diajukan melalui situs web yang sama.

Hanya saja, fasilitas pelacakan status perizinan lewat situs web ini khusus diberikan kepada pemohon perizinan satu paket. Untuk perizinan reguler, fasilitas tersebut belum dapat dinikmati. “Meski ada sistem paket, kami tetap melayani perizinan secara reguler,” ujar Reddy.

Untuk pelayanan reguler, BPPT Sidoarjo juga menerapkan pelayanan jemput bola di kecamatan. Melalui program *one day service*, kegiatan yang berlangsung sejak 2009 ini dilaksanakan dua kali dalam setahun. Perizinan yang dilayani adalah SIUP dan TDP. Bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), program ini juga melayani pengurusan NPWP.

Inovasi terus menerus yang dilakukan oleh BPPT ini tidak terlepas dari komitmen badan yang memiliki 50 orang pegawai ini. “Untuk menjaga kualitas layanan, kami terus mempertahankan ISO dan tetap konsisten melakukan audit internal dan eksternal serta survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, pungkas Reddy.

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





KABUPATEN BANYUWANGI

Champion untuk Grand Category
Kinerja Politik Lokal

Champion untuk Special Category
Partisipasi Publik





KABUPATEN BANYUWANGI

- Champion untuk Grand Category Kinerja Politik Lokal
- Champion untuk Special Category Partisipasi Publik

Biayai Usul Konkret Sesuai Duit

CAPAIAN Banyuwangi benar-benar "wangi" dalam Otonomi Awards (OA) 2013. Kabupaten ini menjadi bintang dengan menyabet dua penghargaan OA pada indikator pertumbuhan ekonomi dan partisipasi publik. Selain itu, dengan meraih *special category* partisipasi publik, daerah yang dijuluki *Sunrise of Java* itu berhasil memboyong *Grand Category Region in a Leading Profile on Public Participation* atau Daerah dengan Profil Menonjol dalam Partisipasi Publik.

Setelah dirintis sejak 2008, Bupati Azwar Anas terus menggerakkan-sinergi inovasi kebijakan agar suara rakyat bisa berubah menjadi pembangunan berkualitas. Fokusnya, memperkuat efektivitas pagu indikatif dan integrasi musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Implementasi kebijakan pagu indikatif memang bukan satu-satunya di Jawa Timur.

Daerah di Jatim yang telah mengimplementasikan, antara lain, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten/Kota Probolinggo. Lewat pagu indikatif, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencoba untuk menghilangkan stigma bahwa musrenbang hanya basa basi. Caranya melalui kepastian alokasi pendanaan pembangunan di setiap kecamatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pagu indikatif kecamatan memastikan jumlah anggaran yang disediakan pemerintah dari usul yang disetujui dalam musrenbang desa/kelurahan.

Pada 2012 disediakan pagu Rp 100 miliar yang dibagi secara proporsional ke-24 kecamatan. Pertimbangannya dengan variabel, antara lain, jumlah penduduk miskin, indeks kesehatan, dan indeks pendidikan. Musrenbang tidak lagi menyusun rentetan daftar usul panjang, namun konkret dan realistis sesuai dengan duit yang disediakan pemerintah atau yang bisa diswadayakan.

Keunggulan Banyuwangi terletak pada caranya menyiasati luas wilayah. Kabupaten berwilayah terluas di Jatim (5.782 km²) ini membangun Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah (SIPKD) pada musrenbang. Sistem ini meng-*online*kan usul desa/kelurahan dengan kecamatan dan dinas terkait di kabupaten. Karena itu, proses pembangunan pun terpantau secara integratif.

Di jejaring *online* ini dipertemukan suara masyarakat dengan pemerintah. Tidak semua harus pemerintah yang menangani. Bisa juga diyakinkan, sebagian usul dapat ditangani sendiri melalui swadaya masyarakat. Partisipasi pun berkembang. "Misalnya, dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Banyuwangi. Rehab sekolah, penambahan ruang kelas, pembangunan perpustakaan, mebel sekolah disampaikan secara langsung oleh masyarakat, dipantau secara *online* oleh dinas pendidikan. Ini menguatkan mekanisme perencanaan dari bawah, *bottom up planning*," kata Sulihiono, kepala dinas pendidikan.

Musrenbang integratif juga memiliki dampak pada sektor kesehatan. "Kebutuhan masyarakat yang diakomodasi semakin banyak dan tentunya berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesehatan masyarakat melalui



- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rangkaian kegiatan Musrenbang di kabupaten yang berada di ujung timur pulau Jawa ini.

rehabilitasi fisik puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), poskesdes secara signifikan," imbuh dr Widji Lestari, kepala dinas kesehatan. Karena suaranya didengar dan usulnya berpeluang didanai, kepala desa pun lebih mudah mengajak warga bermusrenbang. "Awalnya, warga kami tidak lagi tertarik dengan musrenbang.

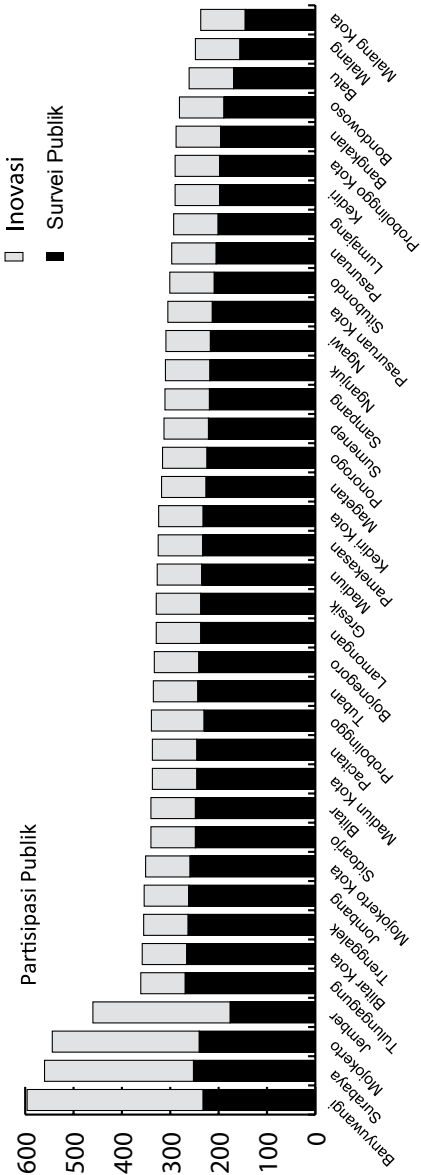
Tetapi, dengan inovasi dari Bupati Anas untuk menyediakan anggaran dan peluang masuknya usul desa, warga kami menjadi semangat kembali. Mereka sangat berharap ada percepatan pembangunan di tingkat desa," kata Sumarto, kepala Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar. Pada 2013, misalnya, beberapa usul dari Tembokrejo direalisasi. Misal, penambahan ruang kelas Sekolah Luar Biasa Tembokrejo senilai Rp 140 juta. Juga pembangunan penahan badan jalan di Dusun Krajan senilai Rp 180 juta dan di ruas Jalan Kalimoro- Paludem Desa Tembokrejo senilai Rp 190 juta. Program ini bisa membuat tersenyum warga desa karena mendukung kelancaran transportasi dan ekonomi.

Tentu saja, kemudahan informasi integratif itu bukan proses sulapan. Perjalanan kebijakan SIPKD tergolong cukup panjang. Dimulai 2008, SIPKD dibangun oleh Tim BPPT dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi, lantas diuji coba ke beberapa dinas pada 2009. Mulai 2010, implementasi SIPKD digunakan oleh seluruh dinas sebagai penunjang musrenbang di kabupaten, kecamatan, hingga ke kelurahan/desa.

Berlanjut pada 2011, sistem ini telah diimplementasikan ke 217 desa/kelurahan. Hingga 2012, sistem ini telah sepenuhnya dipergunakan oleh seluruh dinas dan seluruh desa sekabupaten melalui jaringan WAN (*Wide Area Network*) Pemkab.

Desa yang tidak terjangkau pembangunan jaringan WAN difasilitasi dengan koneksi SIPKD melalui VPN (*Virtual Private Network*) oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. Selain itu, yang terlibat pengembangan SIPKD ini adalah bagian pemerintahan sekretariat daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD).

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





KOTA SURABAYA

Champion untuk Special Category

Akuntabilitas Publik



KOTA SURABAYA

Champion untuk Special Category Akuntabilitas Publik

Temuan BPKP Sempurnakan e-Government

KOTA Roma tidak dibangun dalam waktu semalam. Begitu pula penerapan *e-government* di Kota Surabaya. Pada tahap awal, implementasi *e-government* di kota ini tidak pernah dirumuskan bagaimana konsep besarnya. Semuanya dikembangkan secara bertahap sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah kota.

Perjalanan panjang itu dimulai pada 2003, diawali dengan program lelang serentak (*e-procurement*) yang dimotori Bagian Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda). Saat itu, Kepala Bina Bangda dijabat oleh Tri Rismaharini. Kini, dengan posisi sebagai wali kota, Risma terus mengembangkan upaya mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang dulu telah dirintisnya.

Secara konseptual, penerapan *e-government* Kota Surabaya baru memiliki gambaran utuh pada 2008. Semuanya dibagi ke dalam empat



- Pembangunan jalan frontage Ahmad Yani merupakan proyek pemerintah Kota Surabaya yang memanfaatkan sistem e-gov.

kelompok besar. Yaitu, perencanaan pembangunan daerah, sistem manajemen pemerintahan, layanan masyarakat, dan komunikasi masyarakat.

Dalam konteks belanja untuk pembangunan daerah, kota ini memiliki enam produk unggulan. Yaitu, *e-budgeting*, *e-project planning*, *e-procurement*, *e-delivery*, *e-controlling*, dan *e-performance*. Sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan yang mengintegrasikan aktivitas birokrasi mulai hulu sampai hilir ini diberi titel *Government Resources Management System* (GRMS).

Dengan sistem terintegrasi ini, birokrasi Pemkot Surabaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Penerapan *e-budgeting* hingga *e-procurement* diakui telah memicu efisiensi anggaran yang signifikan. Sementara *e-delivery* telah membantu seluruh jajaran birokrasi pemkot untuk membuat dokumen kontrak terkait pengadaan barang dan jasa hanya dalam hitungan menit setelah pemenang lelang diumumkan.

Sementara itu, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat mengontrol aktivitas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan instrumen *e-controlling*. Permasalahan yang timbul dalam proses administrasi sebuah proyek juga dapat diketahui oleh sang pimpinan secara daring (*online*).

Sebelum instrumen *e-controlling* diterapkan, Pemkot seringkali menerima laporan palsu hasil pelaksanaan proyek. “Proyeknya belum selesai, tapi dikatakan sudah selesai dan sudah dibayar 100 persen,” beber Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji.

Pria berkacamata minus ini menambahkan, laporan palsu tersebut terungkap dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan itu pun dijadikan masukan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penerapan *e-government* yang sudah berjalan. “Dengan *e-controlling*, kami tidak dapat dibohongi oleh kontraktor lagi,” ungkapnya.

Rangkaian terakhir GRMS terakhir adalah *e-performance*. Instrumen ini mulai diterapkan pada 2010 dan terkait erat dengan pengembangan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP). Selama ini, pemberian TPP sering dipermasalahkan karena jumlah *take home pay* yang diterima setiap pegawai cenderung sama. Padahal, beban pekerjaan antara pegawai yang rajin dan pegawai yang malas jelas tidak sama.

Dampak yang paling terasa dari penerapan *e-performace* adalah meningkatnya kinerja pegawai Pemkot. Tidak hanya memberikan apresiasi atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik, *e-performance* juga



- Dengan *e-government*, transparansi proyek pemerintah Kota Surabaya bisa dipantau.

memberikan hukuman kepada pegawai yang malas atau telat masuk kantor dengan pemotongan poin tunjangan. “Kalau dulunya pekerjaan cenderung dihindari, sekarang malah dicari,” kisah Agus.

Fungsi lainnya, *e-performance* juga menjadi instrumen untuk pengukuran kinerja instansi. Terutama terkait dengan target dan realisasi penyerapan anggaran, ketepatan waktu dan efisiensi anggaran yang dapat dilakukan masing-masing SKPD. Semua merujuk kepada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah disusun sebelumnya.

Seluruh rangkaian GRMS itu tidak bisa dilepaskan dari pendokumentasian hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan alias musrenbang secara elektronik (*e-musrenbang*). Tahapan inilah yang menjadi kunci awal keberhasilan penerapan *e-government* di Kota Surabaya. “Kalau ingin sukses menjalankan *e-government*, sistemnya memang harus lengkap dari awal sampai akhir,” terang Agus.

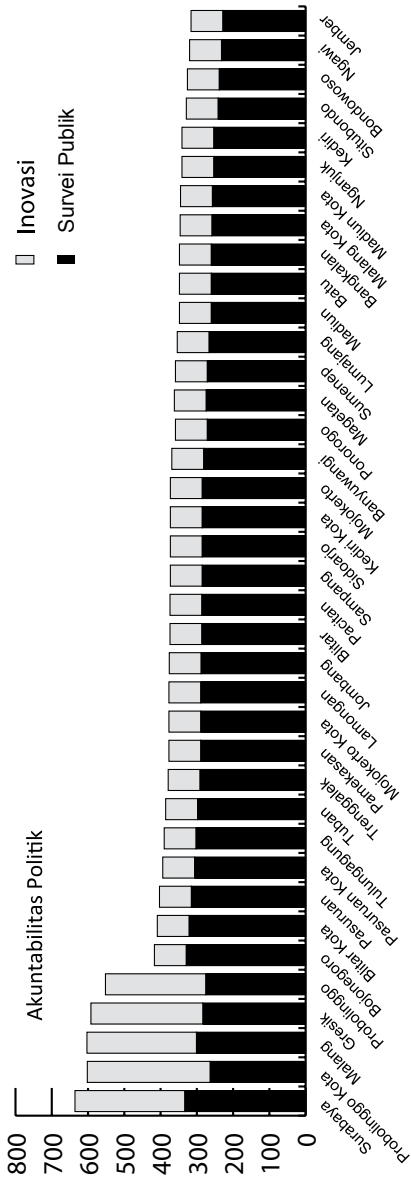
Dengan *e-musrenbang*, publik dapat mengetahui usulan apa saja yang telah diverifikasi oleh setiap SKPD. Mulai dari lokasi pekerjaan, tipe pekerjaan (fisik atau non-fisik), volume, anggaran, hingga SKPD yang menjadi *leading sector*. Informasi lainnya adalah skala prioritas setiap pekerjaan. Tidak tanggung-tanggung, situs web musrenbang.surabaya.go.id telah menyajikan data usulan dan laporan hasil pelaksanaan musrenbang selama lima tahun terakhir.

Menurut Agus, pengembangan *e-government* dilatarbelakangi keinginan kuat Pemkot Surabaya untuk membenahi sistem pemerintahan agar menjadi lebih akuntabel, efektif dan efisien. Artinya, hemat waktu dan tidak mengulang pekerjaan yang sama. “Pada dasarnya, kita mengelektronikkan yang sebelumnya manual. Sebab, di sana banyak celah penyimpangan,” lanjutnya.

Saat ini, Pemkot Surabaya boleh berbangga diri. Pasalnya, program yang mereka inisiasi sejak satu dekade lalu telah banyak diadopsi daerah lain. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pun kepincut dengan penerapan *e-performance*. Tahun 2014, DKI Jakarta juga akan mengadopsi sistem *e-budgeting*. “Di DKI, Jokowi dibuat pusing oleh lebih dari seribu SKPD yang masih menggunakan sistem manual,” tutur Agus.

Setelah merasa sukses mengembangkan *e-government*, Pemkot Surabaya terus berinovasi. Mulai awal 2013, kota ini meluncurkan *Surabaya Single Window* (SSW) untuk mengintegrasikan berbagai layanan perizinan. “Harapannya, semua SKPD yang berkaitan dengan perizinan dapat terkoneksi dalam satu server,” pungkas Agus.

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





KABUPATEN PACITAN

Champion untuk Kategori Khusus Sanitasi



KABUPATEN PACITAN

Champion untuk Kategori Khusus Sanitasi

Blusukan, Bupati Genjot Promosi STBM

JAUH dari ibukota provinsi tidak membuat kabupaten di tapal batas Jawa Timur ini abai terhadap perbaikan sanitasi. Justru sebaliknya, daerah yang dipimpin Bupati Indartato ini menjadikan sektor sanitasi sebagai tantangan tersendiri.

Bupati yang punya hobi *blusukan* ini menuturkan, upaya membangun sanitasi di daerah miskin seperti Kabupaten Pacitan tidaklah mudah. Sebab, tantangan yang dihadapi bersifat ganda. “Kami harus mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus membantu sebagian warga yang punya keterbatasan ekonomi,” ujarnya.

Karena itu, Pak In –panggilan akrab Bupati Indartato-- berusaha mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mengatasi problem yang dihadapi daerah. Khususnya problem sanitasi. Tidak heran jika pria yang mengawali karier dari bawah ini kemudian memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempromosikan pentingnya sanitasi yang sehat.

Salah satu momentum yang selalu dimanfaatkan untuk promosi

sanitasi adalah kegiatan Tilik Warga. Momen *blusukan* yang digelar setiap bulan ini hampir selalu digunakannya untuk menantang para kepala desa mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan alias *open defecation free* (ODF).

Sebagaimana diketahui, indikator stop buang air sembarangan alias ODF merupakan satu dari lima pilar penting STBM yang telah dicanangkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008. Empat pilar lainnya adalah cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Di berbagai kesempatan berbeda, Pak In juga terus menggeber akselerasi pencapaian STBM. “Sebenarnya upaya ini sudah ada sejak lama, tapi semangatnya yang kurang. Karena itu, kita dorong semangat masyarakat dan kader-kader kesehatan,” tuturnya.

Dari data yang diperoleh JPIP, tekad memperluas capaian ODF di kabupaten ini memang sempat berjalan melambat. Pada 2010, tiga tahun setelah gerakan STBM dicanangkan oleh menteri kesehatan, hanya 38 dari 171 desa dan tiga kecamatan di Kabupaten Pacitan yang berani menyatakan diri sebagai telah berstatus ODF.

Pada 14 Juni 2011, empat bulan setelah dilantik menjadi bupati, Indartato menerbitkan surat edaran tentang kegiatan STBM. Pada akhir 2011, wilayah ODF dilaporkan bertambah menjadi 48 desa dan empat kecamatan. Tidak puas dengan capaian itu, dia pun menerbitkan instruksi bupati tentang percepatan ODF. Hasilnya, jumlah wilayah berstatus ODF melonjak menjadi 138 desa dan tujuh kecamatan (2012), lalu meningkat menjadi 148 desa dan delapan kecamatan (2013).

Secara konseptual, promosi STBM di tanah kelahiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dirumuskan dalam tujuh strategi yang disingkat menjadi Klinik’s. Akronim dari komitmen, legalitas, informasi, *networking*, inovasi, kompetisi dan penghargaan, serta sinergi. Tujuh langkah strategis inilah yang kemudian dijalankan secara konsisten dan dikembangkan menjadi motor gerakan STBM di Kabupaten Pacitan.

Sebaik apapun konsep yang dirumuskan, pasti akan menjadi macan kertas jika tidak diiringi komitmen kuat kepala daerah. Hal itu disadari betul oleh Indartato. Karena itu, dia berusaha selalu menjadi garda depan dalam realisasi komitmen tersebut.

Seorang perempuan renta penerima manfaat program Grindulu Mapan

KONDISI AWAL (2007)



yang ditemui peneliti JPIP menuturkan kesaksian tentang hobi *blusukan* bupati. Suatu pagi, ia kaget karena diberitahu oleh istri kepala desa bahwa rumahnya akan didatangi bupati. Karena itu, ia dilarang bepergian dan diminta memasak untuk suguhan.

Karena tidak punya persediaan apa-apa, ia hanya berdiam di rumah sesuai arahan bu kades. Siang harinya, bupati benar-benar datang ke rumah nenek miskin tersebut. Lebih mengagetkan lagi, sambil ngobrol, bupati juga *blusukan* sampai ke dapur dan kamar mandi kecil yang dimilikinya.

Grindulu Mapan merupakan akronim dari Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan. Program andalan daerah ini mengambil ikon Sungai Grindulu yang dikenal oleh seluruh masyarakat Pacitan. Dalam konteks sanitasi, program ini juga disinergikan ke dalam tujuh langkah strategis STBM di atas.



- Kondisi jamban setelah program STBM. Selain terjadi pembangunan jamban sehat, perilaku masyarakat juga berubah.



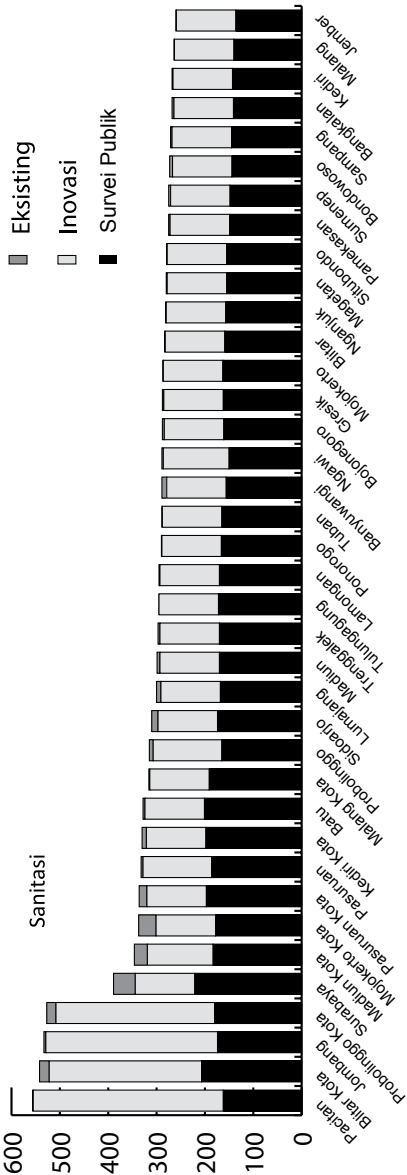
Ditanya tentang motivasi *blusukan*, Indartato menyatakan bahwa langkah itu merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan data dan informasi tentang kondisi riil masyarakat. Juga, menjadi cara efektif untuk mengenalkan diri, berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.

Menariknya, hobi tersebut telah dilakukan Indartato sejak puluhan tahun lalu. Bukan semata dipicu oleh upaya meningkatkan elektabilitas figur pada era pilkada langsung. “Saya mulai senang *blusukan* sekitar 1984, ketika menjabat sebagai Camat Pringkuku,” ungkapnya.

Dia menuturkan, hobi itu muncul setelah seorang warga datang ke kantor kecamatan dan tidak mengenalinya sebagai camat. Ketika itu, dia tengah menemani staf kecamatan menyapu halaman kantor. “Mungkin wajah saya memang *potongan* orang susah, bukan *potongan* camat,” kenangnya sambil tertawa.

Namun, kejadian itu justru membawa hikmah tersendiri bagi Indartato. Setelah membiasakan diri *blusukan*, dirinya menjadi lebih banyak tahu kondisi riil masyarakat. “Waktu itu, jika sewaktu-waktu dipanggil bupati, saya sudah punya data lengkap tanpa membawa catatan apapun,” tegasnya.

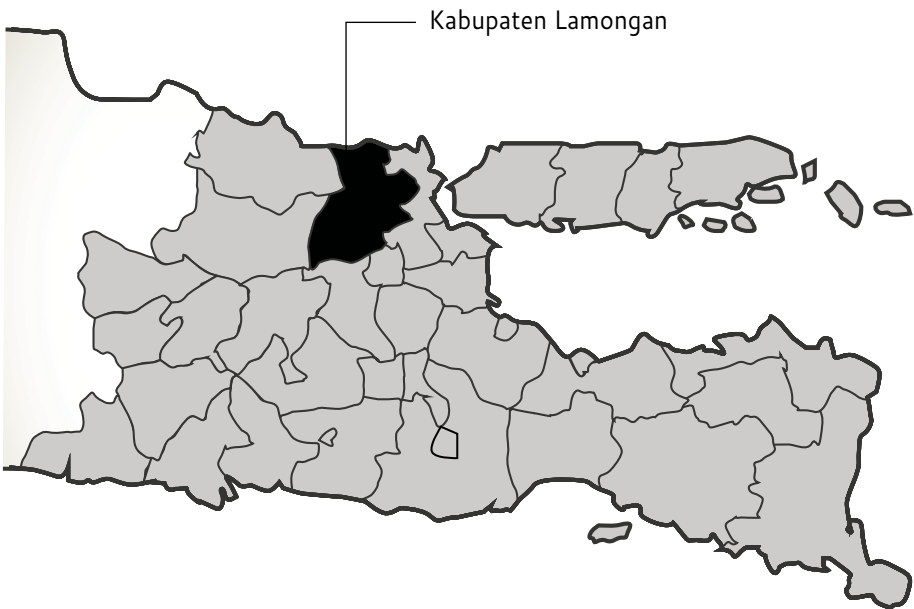
Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur





KABUPATEN LAMONGAN

*Champion untuk Kategori Khusus
Pengelolaan Lingkungan Hidup*



KABUPATEN LAMONGAN

Champion untuk Kategori Khusus Pengelolaan Lingkungan Hidup

Mengubah Audit Jadi Kultur Kompetisi

Menerapkan prinsip tiada kemajuan tanpa kompetisi, Kota Soto ini telah berhasil memotivasi warganya untuk melakukan banyak hal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sasarannya mulai dari anggota Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPHAM), hingga ibu-ibu rumah tangga di berbagai pelosok desa.

Konsep besar yang diusung daerah ini diberi payung bertitel *Empowerment Award*. Ada tiga komponen yang berada dalam program ini, yaitu HIPPA Award, Kudamas Award, serta Lamongan Green and Clean (LGC) Award.

Dari tiga program di atas, HIPPA Award dan LGC Award berkaitan erat dengan indikator pengelolaan lingkungan yang menjadi fokus monitoring JPJP. Sedangkan Kudamas Award lebih banyak beririsan dengan indikator pemberdayaan ekonomi lokal karena terfokus pada pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Empowerment Award telah mengubah pendekatan audit menjadi kultur kompetisi dan apresiasi. Dengan kata lain, kelompok-kelompok masyarakat

yang menerima alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) didorong untuk memanfaatkan dana yang diterima agar menghasilkan keluaran yang optimal.

Hasilnya, dana stimulan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat ternyata malah berkembang. Pasalnya, berbagai kelompok masyarakat berlomba-lomba memanfaatkan dana yang diterima untuk mencapai hasil maksimal. Meski nominalnya tidak terlalu besar, masyarakat senang karena mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dan memiliki kebanggaan tersendiri.

HIPPA Award, misalnya. Dirintis sejak 2011, program ini telah berhasil mendorong tumbuhnya semangat kompetisi antar-HIPPA untuk memperkuat aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan saluran irigasi. “Kami juga menilai aspek sosial ekonomi dan manajemen keuangan HIPPA,” ujar pengagas HIPPA Award Muthi’ul Mubin.

Ketua Lembaga Studi Analisa Pemerintahan ini menuturkan, terdapat 384 HIPPA yang tergabung dalam 54 Gabungan HIPPA sesuai dengan jumlah daerah irigasi yang terdapat di Kabupaten Lamongan. “Dari jumlah itu, mayoritas masih lemah dari sisi manajemen kelembagaan dan administrasi,” imbuhnya.

Karenanya, *event* ini didesain untuk mendorong setiap HIPPA menampilkan profil dan kinerja terbaiknya sesuai dengan 17 indikator penilaian. Hasilnya, juara I dan II mendapatkan hadiah paket bantuan perbaikan saluran irigasi senilai Rp 40 juta dan 30 juta plus *hand tractor* dari dinas terkait.

Salah satu manfaat program ini antara lain dirasakan oleh masyarakat Desa Jugo, Kecamatan Sekaran. “Di Desa Jugo, saluran irigasi semula tertutup eceng gondok. Tapi kini sudah dapat dilalui sampan kecil yang menjadi kendaraan air warga setempat,” imbuh Mubin.

Sampan atau perahu memang menjadi salah satu alternatif moda transportasi sebagian warga Lamongan. Terutama mereka yang tinggal di kawasan Bono Rowo atau Bengawan Jero. Karena itu, kondisi saluran air yang terawat dan bebas dari eceng gondok tidak kalah penting dibandingkan jalan beraspal bagi warga perkotaan.

Selain HIPPA Award, cerita juga datang dari LGC Award. Dimulai pada tahun yang sama (2011), program ini terfokus pada upaya mendorong partisipasi masyarakat --terutama ibu-ibu rumah tangga-- yang menjadi kader lingkungan di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Pelaksanaan LGC Award dibagi menjadi lima tahapan tematik. Dimulai dari *Green and Clean* (2011), *Waste Lover* (2012), Menuju Lamongan Merdeka dari Sampah dengan Bank Sampah (2013), Warna-warni Bunga (2014), dan diakhiri tema Merdeka dari Sampah (2015). Program tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Bupati No. 1/2011 yang berlaku efektif mulai 3 Januari 2011.

Awalnya, LGC hanya menargetkan partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan. Dimulai dari Kelurahan Jetis dan Desa Made (Kecamatan Kota Lamongan), program ini lalu menjadi gerakan yang bersifat massal dan diikuti hampir semua desa di 27 ibukota kecamatan lainnya. Belakangan, juara LGC Award juga bermunculan dari luar wilayah kecamatan kota.

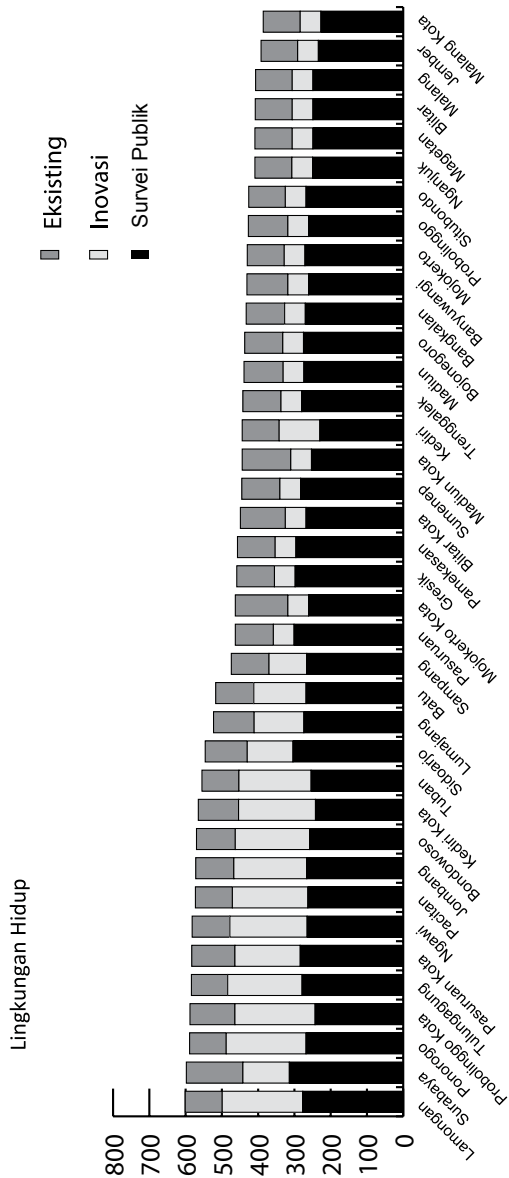
Beberapa kader lingkungan di Desa Butungan, Kecamatan Kalitengah, misalnya, mengakui bahwa LGC telah memotivasi mereka untuk menata lingkungan menjadi lebih baik. Kekompakan warga juga terbangun karena program ini. “Karena keinginan kuat menjadi yang terbaik, tidak terasa telah banyak dana swadaya yang dibelanjakan masyarakat,” tutur Sumaroh, kader lingkungan yang terpilih menjadi Kepala Desa Butungan.

Kader lingkungan lainnya mengakui, keberhasilan mereka tidak bisa dilepaskan dari proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah belajar dari keberhasilan program *Surabaya Green and Clean*. “Terus terang, kader lingkungan kami juga banyak belajar dari keberhasilan Kota Surabaya melalui tayangan SBO TV,” ungkap Sumaroh, diamini beberapa kader lainnya.

Ditanya kenapa program LGC baru dicanangkan pada 2011, Bupati Lamongan Fadeli menegaskan bahwa itu adalah salah satu terobosannya pada tahun pertama. “Saya baru dilantik awal Agustus 2010. Jadi, LGC ini salah satu gebrakan di tahun pertama,” tegasnya.

Kini, Kota Soto ini sedang bersiap membangun pembangkit listrik dengan bahan baku eceng gondok dan sampah organik. Pembangkit listrik berkapasitas satu mega watt itu diperkirakan akan membutuhkan bahan baku sebanyak 60 ton per hari. Program ini akan dibiayai oleh Bank Dunia dan Hyacinth Energy BV (Belanda) bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. “Posisi Pemkab Lamongan hanya memfasilitasi,” ungkap Fadeli.

Ranking Kabupaten/Kota di Jawa Timur



**DORONG
KEMAJUAN
DAERAH**

LEWAT OTONOMI AWARDS



The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) adalah lembaga independen yang secara intensif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Lembaga ini didirikan oleh Jawa Pos Group pada 1 April 2001, tepat tiga bulan setelah otonomi daerah diberlakukan. Sebagai lembaga yang perhatian terhadap kemajuan otonomi daerah, JPIP selalu mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi pada ranah pengembangan ekonomi, pelayanan publik, kinerja politik lokal, pengelolaan lingkungan hidup, dan sanitasi. Lima bidang inilah yang sekaligus menjadi parameter untuk menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Setiap tahun, kepada kabupaten dan kota yang memiliki kinerja terbaik pada setiap parameter diberikan apresiasi tertinggi berupa Otonomi Award. Saat ini, JPIP telah dikembangkan di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

WWW.JPIP.OR.ID

ISBN :
978-602-71875-2-8